

JALAN POLITIK NABI MUHAMMAD: Etika Kenabian dalam Krisis Kepemimpinan Global

Mohamad Asrori Mulky
STISNU Nusantara Tangerang
moh.asrori.mulky@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the political dimension of the Prophet Muhammad's mission as an ethical and practical model in addressing the global leadership crisis that has unfolded over recent decades. Employing a historical-hermeneutical approach this study explores how the Prophet's political strategy was not merely power-oriented, but aimed at reconstructing society based on revelation, social justice, and moral civilization. In the context of rising authoritarianism, religious populism, and a global crisis of trust in modern political systems, the political path of the Prophet offers an alternative paradigm grounded in morality, consultation (shūrā), minority protection, and the vision of an ummatan wasātan (a balanced and just community). This article emphasizes that the Prophet Muhammad's political path was not one of domination, but of social transformation rooted in divine values.

Keywords: *Prophetic Politics; Prophet Muhammad; Global Crisis; Islamic Ethics; Leadership; Political History.*

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis dimensi politik dalam kenabian Muhammad SAW sebagai model etis dan praksis dalam menghadapi krisis kepemimpinan global yang terjadi dalam beberapa dekade ini. Dengan pendekatan historis-hermeneutik tulisan ini mengurai bagaimana strategi kenabian Nabi Muhammad tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi pada rekonstruksi masyarakat berbasis wahyu, keadilan sosial, dan peradaban akhlak. Dalam konteks meningkatnya otoritarianisme, populisme religius, dan krisis kepercayaan global terhadap sistem politik modern, jalan politik yang telah disusuri Nabi Muhammad menawarkan paradigma alternatif yang menekankan pada moralitas, musyawarah, perlindungan minoritas, dan visi *ummatan wasātan*. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa jalan politik Nabi Muhammad bukanlah jalan dominasi, tetapi jalan transformasi sosial berbasis nilai-nilai langit.

Kata Kunci: Politik Kenabian; Nabi Muhammad; Krisis Global; Etika Islam; Kepemimpinan; Sejarah Politik.

PENDAHULUAN

Krisis politik global dewasa ini memunculkan situasi yang paradoksal. Di satu sisi, demokrasi prosedural mengalami ekspansi dalam banyak negara; namun di sisi lain, dunia juga menyaksikan kemunduran dalam aspek etika publik dan integritas kepemimpinan. Banyak rezim otoriter telah runtuh dan digantikan oleh sistem pemerintahan demokratis, tetapi demokrasi tersebut acapkali dikooptasi oleh elit oligarkis, manipulasi simbol-simbol agama, maupun populisme yang tidak berpijak pada tanggung jawab moral. Perang di negara-negara Timur Tengah juga memperlihatkan ketidakmampuan pemimpin dunia dalam menjaga ketertiban global. Krisis ini melampaui persoalan institusional; ia menyentuh akar moral dan peradaban politik umat manusia.

Situasi inilah yang menuntut kita untuk menggali ulang fondasi etis dan historis dalam memahami serta merumuskan ulang arah politik kontemporer. Salah satu rujukan penting dalam hal ini adalah jalan politik Nabi Muhammad SAW—sebuah model kenabian yang menyatukan dimensi spiritual dan praksis sosial-politik dalam kerangka nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keberadaban universal.

Dalam catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad bukan hanya figur religius, tetapi juga pemimpin komunitas, arsitek negara, dan diplomat yang piawai. Namun, seluruh kiprah politik beliau bukan lahir dari hasrat kekuasaan pribadi, melainkan sebagai bagian integral dari misi kerasulan untuk membangun masyarakat yang adil dan membawa rahmat bagi semesta. Seperti dikemukakan pemikir kenamaan Fazlur Rahman, bahwa Nabi berhasil mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas kenabian dan kenyataan sosial-politik dalam dinamika sejarah yang harmonis dan progresif. Rahman menyebut Nabi sebagai reformis sosial yang digerakkan oleh visi transenden mengenai keadilan dan kasih-sayang ilahi.¹

Lebih dari sekadar pemimpin politik, Nabi Muhammad menggagas sebuah masyarakat politik yang berdiri di atas wahyu dan prinsip-prinsip moral universal. Komunitas Madinah yang beliau rintis tidak dibangun sebagai negara teokratis yang eksklusif, melainkan sebagai masyarakat perjanjian yang menjunjung prinsip kesetaraan dan keberagaman. Piagam Madinah adalah dokumen awal yang menunjukkan model tata kelola berbasis partisipasi, hak sipil, dan pluralisme. Sejarawan Fred Donner

¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 35.

menyebutnya sebagai proyek kenabian untuk menyatukan komunitas politik di bawah hukum moral Tuhan.²

Dalam konteks global saat ini, ketika umat manusia terpecah antara ekstremisme religius dan sekularisme radikal, jalan politik Nabi Muhammad menawarkan jalan tengah: politik spiritual yang menuntun manusia menuju cita-cita keadilan, perdamaian, dan martabat yang berkeadaban. Karen Armstrong dalam karyanya *Muhammad: A Prophet for Our Time* menggambarkan misi Nabi sebagai misi penyembuhan, rekonsiliasi, dan pembentukan komunitas yang hidup berdampingan dalam keadilan dan kedamaian.³ Model seperti ini makin langka dalam lanskap politik global kontemporer yang dipenuhi hasrat dominatif dan destruktif.

Kebuntuan demokrasi liberal yang berlaku di hampir seluruh negara di dunia—yang tercermin dari meningkatnya polarisasi, kesenjangan ekonomi, serta krisis kepercayaan terhadap representasi politik—telah mendorong munculnya kebutuhan akan model kepemimpinan baru: yaitu kepemimpinan yang bukan hanya rasional dan teknokratis, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai etika profetik. Dalam perkembangan pemikiran politik Islam mutakhir, muncul kesadaran tentang pentingnya *prophetic political ethics* sebagai dasar untuk merumuskan sistem politik yang adil dan manusiawi, yang berpihak pada pembelaan terhadap kelompok marjinal dan tertindas baik secara struktural maupun kultural. Abdullahi Ahmed An-Na'im, pemikir asal Sudan, menegaskan bahwa nilai-nilai Islam harus diterjemahkan ke dalam kerangka modern tanpa mengorbankan substansi etikanya.⁴ Kontekstualisasi nilai-nilai Islam mendesak diaktualkan dalam kehidupan global ini.

Namun demikian, realitas pemikiran politik Islam dewasa ini justru sering kehilangan akar kenabiannya. Politik dijadikan alat mobilisasi identitas dan simbolisme keagamaan, tanpa disertai upaya pembenahan struktur kekuasaan dan moralitas publik. Akibatnya, banyak gerakan Islam politik jatuh ke dalam jebakan retorika tanpa substansi, minim makna, jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial, musyawarah, dan kemaslahatan. Karena itu, pendekatan politik Nabi harus dikembalikan sebagai bentuk *ijtihad etik profetik* yang menolak komodifikasi agama untuk kepentingan kekuasaan semata.

² Fred M. Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2010), 68.

³ Karen Armstrong, *Muhammad: A Prophet for Our Time* (New York: HarperOne, 2006), 13.

⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 45.

Pemikir seperti Tariq Ramadan menyebut politik kenabian sebagai “etika transformasional yang diwujudkan dalam tindakan.”⁵

Lebih lanjut, penting dipahami bahwa jalan politik kenabian berbeda secara fundamental dari model politik ideologis atau kekuasaan konvensional. Politik Nabi tidak bertumpu pada kalkulasi mayoritas, tetapi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pada prinsip moral yang diturunkan dari nilai-nilai ilahi yang transenden. Dalam kerangka ini, kekuasaan dipahami bukan sebagai dominasi, tetapi sebagai amanah dan pelayanan yang tulus terhadap umat. Yusuf al-Qaradawi bahkan menegaskan bahwa politik dalam Islam adalah ibadah, apabila dijalankan dalam semangat kejujuran, tanggung jawab, dan amanah.⁶ Karena itu, aktivitas politik yang membawa kehancuran, disintegrasi, dan penderitaan umat manusia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di akhirat kelak.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tafsir ulang terhadap dimensi politik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan menjadikannya cermin reflektif atas berbagai persoalan kontemporer yang menghimpit kehidupan manusia modern. Melalui pendekatan historis dan etis, artikel ini mencoba menjawab bagaimana strategi dan prinsip politik Nabi dapat ditransformasikan sebagai inspirasi bagi pembaruan etika politik yang adil, inklusif, dan beradab. Kajian ini juga mengangkat kembali relevansi Piagam Madinah, etos kepemimpinan Nabi, serta strategi dakwah politik beliau sebagai tawaran alternatif terhadap narasi politik global yang cenderung didominasi konflik ideologis dan kepentingan pragmatis yang berdampak pada pertikaian dan kehancuran.

Dengan demikian, pengkajian atas jalan politik kenabian tidak semata-mata bertujuan untuk mengenang masa lalu, melainkan untuk membangun rujukan normatif dalam merancang masa depan politik dunia yang sudah terjebak dalam pusaran konflik dan peperangan. Madinah, dalam hal ini, harus dibaca bukan sekadar sebagai lokasi historis, tetapi sebagai simbol dan proyek etik-politik profetik yang menawarkan harapan bagi dunia yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta berpijak pada kerangka hermeneutik historis untuk mengeksplorasi

⁵ Tariq Ramadan, *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 113.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 59.

dinamika politik dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Studi ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan telaah terhadap berbagai sumber maupun literatur yang mendukung, yang membahas secara mendalam aspek-aspek politik Nabi, tradisi pemikiran politik Islam klasik, serta refleksi kontemporer dalam konteks global saat ini.

Melalui pendekatan hermeneutik, penulis berupaya menafsirkan makna-makna historis dalam teks-teks klasik dan narasi sejarah Nabi secara mendalam—tidak hanya menyampaikan data secara deskriptif, tetapi juga memahami konteks dan nilai yang terkandung di dalamnya. Model penafsiran ini memungkinkan identifikasi terhadap dimensi etis dan struktural dari tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat Arab abad ke-7, serta membuka ruang komparasi dengan problematika politik abad ke-21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Nabi: Dari Minoritas Mekkah Menuju Tata Kelola Negara Madinah

Transformasi politik yang digerakkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa historis yang sarat makna. Bermula dari seorang penyampai wahyu di tengah dominasi budaya pagan Quraisy Mekah yang terfragmentasi dalam sistem kesukuan (*tribalisme*), Nabi Muhammad secara bertahap membangun tatanan sosial-politik yang terorganisir dan berkeadaban di Madinah. Perjalanan ini bukan sekadar migrasi geografis, melainkan transisi paradigma dari dakwah berbasis simbol ke perjuangan struktural yang terencana. Jalan politik kenabian mencerminkan bagaimana nilai-nilai transenden-ilahian dapat diejawantahkan dalam strategi sosial-politik yang bersifat realistis sekaligus etis.

Selama fase Mekah yang berlangsung lebih dari satu dekade, Nabi berada dalam posisi marginal, terpinggirkan, penuh tekanan, menjadi bagian dari kelompok minoritas yang mengalami persekusi. Alih-alih melancarkan perlawanan terbuka, Nabi memilih strategi pembentukan basis spiritual dan moral umat. Dakwah di masa ini berorientasi pada pembangunan karakter, penguatan iman, dan pembentukan solidaritas sosial. Politik kenabian pada fase ini menekankan dimensi spiritual-moral, bukan konfrontasi terhadap struktur politik yang dominan.

Montgomery Watt dalam *Muhammad: Prophet and Statesman*, mencatat bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menantang struktur kekuasaan Quraisy yang saat itu mengkooptasi dan menguasai kehidupan masyarakat, melainkan membangun sebuah

gerakan senyap yang berlandaskan resistensi nilai-nilai moral.⁷ Nabi meyakini bahwa kekuasaan tanpa fondasi etik akan rapuh dan mudah runtuh. Maka, fokus utama Nabi pada periode awal adalah menanamkan akidah, membina akhlak, dan menumbuhkan ukhuwah sebagai dasar dari perubahan sosial jangka panjang. Strategi ini sejalan dengan apa yang oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) disebut sebagai fase “pendewasaan kultural dan spiritual umat Islam awal,” di mana Nabi tidak memaksakan ideologi negara, tetapi menyemai kesadaran baru di tengah kekuasaan lama yang hegemonik.⁸ Dengan kata lain, politik Nabi di Mekah adalah politik kesabaran, ketekunan, dan pendidikan sosial dan spiritual.

Momentum hijrah ke Madinah merupakan titik balik penting dalam ekspansi misi kenabian. Di kota ini, Nabi mulai mengatur kehidupan masyarakat secara lebih sistemik: dari aspek keamanan, keadilan, ekonomi, hingga hubungan antar-komunitas. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa perubahan ini tidak memudahkan esensi kenabian; justru memperluas peran profetik menjadi kepemimpinan publik yang berakar pada amanah moral, bukan nafsu kekuasaan. Fred M. Donner menyebut peristiwa hijrah sebagai langkah strategis Nabi dalam membentuk tatanan moral-politik berdasarkan petunjuk ilahi.⁹ Nabi tidak hanya menjadi pemimpin umat Muslim, melainkan pemimpin seluruh penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai kelompok—termasuk Yahudi dan kaum pagan. Keberagaman inilah yang kemudian menjadi ladang aktualisasi nilai-nilai keadilan dan inklusivitas dalam kepemimpinan Nabi.

Dalam konteks tersebut, tampak bahwa politik Nabi bersifat kontraktual dan kosmopolit. Ia tidak memberlakukan paksaan akidah, melainkan menyusun sistem kehidupan bersama yang berbasis pada prinsip hak dan tanggung jawab timbal balik. Manifestasi konkret dari visi ini terlihat dalam *Piagam Madinah*, yang oleh banyak sarjana dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah politik dunia. Karen Armstrong menyebut dokumen ini sebagai “blueprint bagi koeksistensi damai dalam masyarakat plural.”¹⁰

Di Madinah, Nabi membentuk negara-kota yang dibangun di atas pilar keimanan, keadilan, dan persamaan derajat. Ia menerapkan prinsip-prinsip tata kelola seperti musyawarah, integritas administratif, pengelolaan zakat secara adil, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta kebijakan pertahanan yang berorientasi pada

⁷ W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman* (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm. 72.

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 181.

⁹ Fred M. Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2010), hlm. 91.

¹⁰ Karen Armstrong, *Muhammad: A Prophet for Our Time* (New York: HarperOne, 2006), hlm. 109.

kemaslahatan. Kepemimpinan Nabi tidak bersifat otoriter; sebaliknya, partisipatif. Bahkan dalam situasi perang, Nabi tetap membuka ruang dialog (*syura*) dan mendengarkan pandangan sahabat-sahabatnya.¹¹ Din Syamsuddin menyebut proyek politik kenabian Nabi Muhammad di Madinah dapat dilihat sebagai prototipe dari negara sipil Islam, di mana otoritas politik mendapatkan legitimasi dari kontrak sosial dan dimensi etik, bukan hanya dari struktur kekuasaan formal atau kekuatan militer.¹² Oleh karena itu, jalan politik Nabi Muhammad di Madinah bukanlah tirani agama, tetapi otoritas moral yang lahir dari kerendahan hati, akhlak luhur, dan visi peradaban.

Lebih jauh, sejarah politik Nabi menunjukkan bahwa kekuasaan bisa menjadi jalan rahmat bagi setiap warga negara atau umat manusia jika dikelola dengan prinsip kenabian: keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam dunia modern yang kerap mengabaikan nilai-nilai transenden (ilahiah) dalam politik, model kepemimpinan Nabi di Madinah menjadi rujukan normatif yang sangat relevan untuk menghadirkan tata dunia yang lebih adil dan beradab, berpihak pada kaum tertindas, yang kebebasannya sebagai sebuah bangsa dan manusia belum terpenuhi.

B. Piagam Madinah dan Politik Inklusif

Piagam Madinah (*Ṣaḥīfat al-Madīnah*) menandai salah satu momen paling penting dalam sejarah awal politik Islam. Disusun segera setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, dokumen ini menjadi kerangka dasar bagi komunitas multikultural yang baru terbentuk. Piagam tersebut memperlihatkan bahwa misi politik Nabi bukanlah bersifat eksklusif atau dominatif, melainkan bertumpu pada asas kesepakatan sosial yang menjamin keadilan, persamaan hak, dan perlindungan menyeluruh bagi semua elemen masyarakat—tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial.

Secara struktural, Piagam Madinah terdiri dari sekitar 47 ketentuan yang mencakup spektrum luas bidang hukum, keamanan, dan kehidupan sosial-politik. Dalam naskah tersebut, umat Islam, komunitas Yahudi, dan kelompok-kelompok lain di Madinah diakui sebagai satu entitas politik (*ummah wāḥidah*), yang memiliki hak-hak sipil serta kewajiban kolektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan kota.¹³ Pasal-pasal penting dari Piagam Madinah ini mengatur, antara lain, tentang:

¹¹ Lihat Sirah Ibn Hisham, dalam edisi *Al-Sirah al-Nabawiyah*, tahqiq Muhammad al-Saqqar, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 135.

¹² Din Syamsuddin, “Prinsip-Prinsip Politik Islam dan Tantangan Globalisasi,” dalam *Dialog Peradaban*, ed. Komaruddin Hidayat (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 87.

¹³ Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975), hlm. 23–35.

- Perlindungan terhadap kebebasan beragama (Pasal 25–26).
- Jaminan keadilan bagi seluruh pihak, tanpa diskriminasi (Pasal 16).
- Larangan mendukung musuh dari luar terhadap sesama warga Madinah (Pasal 44).
- Sistem musyawarah dan penyelesaian konflik secara kolektif (Pasal 39–40).

Rafiq Zakaria, penulis asal India, menyebut Piagam Madinah sebagai salah satu contoh awal dari konstitusi pluralistik dalam sejarah manusia, karena mengakui keragaman agama dan politik di bawah satu identitas kewargaan yang setara tanpa hierarki.¹⁴ Penyusunan Piagam Madinah ini tidak sekadar memuat peraturan formal, melainkan juga mencerminkan visi etika politik yang diperkenalkan Nabi. Politik dalam Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bukanlah alat dominasi mayoritas terhadap minoritas, melainkan instrumen untuk membangun tata kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan kooperatif. Dalam kerangka ini, tampak bahwa Nabi telah mempraktikkan model politik inklusif jauh sebelum teori demokrasi pluralistik modern dikenal luas.

Ali Abd al-Raziq, seorang intelektual Muslim modern awal abad ke-20, menilai bahwa politik Nabi lebih merupakan strategi moral untuk hidup berdampingan secara damai, dibanding sebagai proyek kekuasaan atau pembentukan negara otoriter.¹⁵ Nabi tidak mendirikan sebuah negara agama dalam pengertian eksklusif, tetapi membentuk komunitas politik berdasarkan kontrak sosial dan nilai-nilai transendental yang terkandung dalam wahyu. Sementara itu, Syafii Maarif, menegaskan bahwa Piagam Madinah adalah bukti konkret bahwa Islam dari awal telah memiliki kesadaran konstitusional yang menjunjung tinggi pluralitas dan keadilan sosial.¹⁶ Oleh karena itu, dokumen ini dapat dijadikan model untuk merumuskan ulang konsep negara bangsa di dunia Muslim kontemporer yang kerap terjebak dalam konflik identitas keagamaan.

Dalam era global yang ditandai oleh migrasi lintas-negara, keberagaman budaya, dan meningkatnya ketegangan identitas, nilai-nilai yang dikandung Piagam Madinah semakin menunjukkan relevansinya. Dunia modern memerlukan model tata kelola inklusif yang mampu memelihara perbedaan dalam satu tatanan kewargaan yang adil. Jalan politik Nabi yang berakar pada inklusivitas dan konsensus sosial dapat menjadi solusi etis bagi pembentukan masyarakat majemuk yang damai dan beradab. John L.

¹⁴ Rafiq Zakaria, *Muhammad and the Quran: The Messenger and the Message* (New Delhi: Penguin, 1993), hlm. 151.

¹⁵ Ali Abd al-Raziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm* (Kairo: Maktabat Misr, 1925), hlm. 59.

¹⁶ Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 89.

Esposito, seorang pakar studi Islam kontemporer, menyebut bahwa Piagam Madinah menawarkan preseden profetik untuk pemerintahan pluralistik dan perlindungan hak-hak sipil dalam kerangka pemikiran politik Islam modern.¹⁷ Oleh sebab itu, membumikan kembali semangat Piagam Madinah berarti menghidupkan politik kasih sayang, musyawarah, dan kontrak sosial dalam bentuk yang kontekstual dengan kebutuhan zaman.

Bila politik global hari ini dipenuhi oleh eksklusi, polarisasi, dan politik identitas yang agresif, maka Piagam Madinah hadir sebagai ingatan kolektif umat Islam dan kemanusiaan bahwa kebersamaan dan keadilan adalah mungkin, bahkan dalam situasi yang kompleks. Di sinilah jalan politik Nabi Muhammad menampilkan relevansinya yang abadi: bukan sekadar sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai inspirasi etis bagi masa depan dunia.

C. Kepemimpinan Kenabian dan Strategi Dakwah Politik

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menampilkan perpaduan istimewa antara kebijaksanaan spiritual, ketajaman politik, dan kecakapan sosial. Ia tidak hanya menjadi pemimpin melalui instruksi atau komando, melainkan dengan keteladanan moral dan pandangan kenabian yang transenden. Dalam proses membangun masyarakat, Nabi tidak pernah memisahkan antara dakwah sebagai seruan keimanan dan transformasi sosial sebagai upaya perbaikan struktural. Dakwah dipahami bukan semata nasihat keagamaan, tetapi juga strategi membebaskan umat dari belenggu penindasan, kejahilan, dan ketidakadilan.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan alat perebutan kekuasaan. Al-Qur'an menyatakan secara eksplisit: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...*" (QS. An-Nisā' [4]: 58). Nabi Muhammad memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar posisi, melainkan tanggung jawab luhur yang harus dijalankan dengan integritas dan penuh tanggungjawab. Ia menampilkan *al-qudwah al-ḥasanah*, yaitu keteladanan agung dalam seluruh peran yang ia emban: sebagai pemimpin shalat, hakim, komandan militer, hingga kepala pemerintahan.

Dakwah yang dilakukan Nabi bukanlah aktivitas teologis semata, melainkan juga gerakan pembaruan sosial-politik. Saat berada di Mekah, fokus utamanya adalah pembebasan tauhid dari dominasi politeisme. Namun ketika hijrah ke Madinah, dakwah

¹⁷ John L. Esposito, *The Future of Islam* (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 97.

berkembang menjadi gerakan membangun struktur masyarakat yang adil: dari penataan hukum, distribusi ekonomi melalui zakat dan infak, hingga pembentukan pranata keadilan sosial. Nabi menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi hanya dengan wacana spiritual, melainkan memerlukan pembentukan institusi dan transformasi sistemik.

Fazlur Rahman menekankan bahwa misi utama kenabian Muhammad SAW adalah “membentuk masyarakat baru berdasarkan monoteisme etis”, di mana konsep tauhid tidak hanya dipahami sebagai akidah, tetapi juga sebagai etika sosial yang menuntut keadilan dan solidaritas antarumat manusia.¹⁸ Oleh karena itu, pendekatan dakwah Nabi cenderung dialogis, menolak paksaan, dan mengarahkan pada perombakan budaya serta reformasi institusi yang telah lama rusak akibat dominasi sistem tribal dan feodalisme pra-Islam. Nabi Muhammad tidak membangun kekuasaan dengan menebar ketakutan, tetapi dengan menghidupkan harapan dan kasih sayang. Dalam *Fathu Makkah*, beliau memberikan amnesti umum kepada para musuhnya, bahkan kepada mereka yang pernah merencanakan pembunuhannya. Peristiwa ini mencerminkan tinggi dan agungnya prinsip politik kemanusiaan dalam Islam.

Karen Armstrong mencatat bahwa tindakan Nabi tersebut tidak hanya merupakan langkah strategis, tetapi juga sebuah puncak kepemimpinan moral yang menyembuhkan luka sejarah panjang.¹⁹ Kepemimpinan yang dibangun oleh Nabi adalah kepemimpinan yang merekatkan, bukan memecah; yang memuliakan, bukan merendahkan; yang memimpin dengan cinta, bukan dengan kebencian. Dalam refleksi pemikiran Islam Indonesia, Haedar Nashir menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah figur teladan yang menyatukan antara religiusitas, moralitas, dan politik secara integral.²⁰ Maka, kepemimpinan beliau menjadi model ideal dalam konteks dunia modern yang haus akan integritas, kejujuran, dan visi peradaban.

Nabi tidak hanya membangun kekuasaan sesaat, tetapi merancang kesinambungan komunitas. Ia menanamkan nilai-nilai musyawarah, memilih kader yang layak, membina umat dalam ukhuwah, dan menanamkan semangat tanggung jawab kolektif. Bahkan saat wafat, Nabi tidak menunjuk penerus secara eksplisit, tetapi mewariskan prinsip: bahwa kepemimpinan harus lahir dari kesepakatan, musyawarah, dan kompetensi moral. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar pemilihan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama oleh para sahabat melalui kesepakatan di Saqifah Bani Sa'idah. Ini menunjukkan bahwa Nabi telah menanamkan prinsip-prinsip demokratis dan partisipatif sejak awal sejarah

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 23.

¹⁹ Karen Armstrong, *Muhammad: A Prophet for Our Time* (New York: HarperOne, 2006), hlm. 117.

²⁰ Haedar Nashir, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, (Mizan, 2015), hlm. 91.

Islam. Sayyid Qutb bahkan menyebut bahwa Nabi telah membentuk “sebuah generasi yang dibina langsung oleh Al-Qur’an dan dipandu oleh kesadaran sejarah serta tanggung jawab moral.”²¹

D. Krisis Global dan Relevansi Jalan Politik Nabi

Dunia modern tengah bergulat dalam pusaran krisis multidimensi: krisis kepemimpinan, disorientasi etika, konflik identitas, serta ketimpangan sosial yang kian melebar. Perang di negara-negara Timur Tengah masih berlangsung bahkan belum terlihat batas akhirnya. Serangan Israel yang membabi-buta terhadap penduduk Palestina menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan. Demokrasi liberal yang dijunjung banyak negara tak selalu membawa keadilan substantif. Sementara itu, otoritarianisme yang mencuat di banyak belahan dunia kerap mengorbankan hak-hak sipil dan memperparah polarisasi sosial. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai jalan politik Nabi Muhammad SAW kembali menemukan relevansinya.

Abad ke-21 menyaksikan keterputusan antara kekuasaan dan moralitas. Banyak pemimpin dunia kehilangan kepercayaan publik karena korupsi, manipulasi, dan hilangnya rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Politik menjadi ajang transaksional yang menanggalkan prinsip-prinsip moral. Dalam konteks ini, jalan politik Nabi menampilkan alternatif historis yang etis dan spiritual: kekuasaan bukan untuk dominasi, melainkan untuk pelayanan; kepemimpinan bukan untuk kehormatan, melainkan amanah. Warren Bennis dalam karyanya *The Future of Leadership* menekankan pentingnya otoritas moral (*moral authority*) dalam kepemimpinan masa kini, yakni legitimasi yang berasal dari keutuhan integritas, bukan hanya dari kemenangan elektoral.²² Prinsip ini sejalan dengan pola kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah mengejar jabatan, namun justru memperoleh kepercayaan kolektif karena keteladanan hidupnya yang autentik dan tidak pencitraan.

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi politik global dewasa ini adalah bangkitnya ekstremisme berbasis identitas—baik itu identitas keagamaan, etnis, maupun ideologis. Fragmentasi ini berdampak pada menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya eksklusivisme dalam ruang publik. Dalam konteks ini, jalan politik Nabi menunjukkan model kepemimpinan yang mengelola keberagaman secara adil dan konstruktif yang didasarkan pada politik kasih sayang dan kebersamaan. Piagam Madinah merupakan bukti historis bahwa beliau membangun kontrak sosial inklusif yang tidak

²¹ Sayyid Qutb, *Ma‘ālim fī al-Ṭarīq*, (Beirut: Dar al-Shuruq, 1987), hlm. 28.

²² Warren Bennis, *The Future of Leadership* (San Francisco: Jossey-Bass, 2001), hlm. 31.

menghapus perbedaan, melainkan mengelolanya secara proporsional demi kebaikan bersama.

Bahtiar Effendy dalam *Islam and the State in Indonesia*, menegaskan bahwa tantangan utama umat Islam saat ini adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai sumber etika publik yang inklusif dalam masyarakat majemuk, tanpa terjebak dalam narasi eksklusivisme politik.²³ Dalam hal ini, jalan politik Nabi menjadi teladan: Ia menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama, bukan alasan untuk konflik.

Globalisasi memang mempercepat arus informasi dan mobilitas kapital, tetapi juga menghadirkan alienasi, komodifikasi manusia, dan kekosongan makna. Nilai-nilai duniawi merasuki ruang publik, sedangkan spiritualitas dan etika terdorong ke pinggiran kehidupan sosial. Politik kenabian mengajarkan bahwa peradaban sejati mesti dibangun di atas landasan moral dan tanggung jawab transenden. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107: "*Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.*"

Sayyid Hossein Nasr menegaskan bahwa peradaban Islam adalah tatanan kehidupan yang memadukan antara keadilan sosial dan kesadaran metafisis, mengharmonikan antara kehidupan duniawi dan akhirat.²⁴ Konsepsi ini sangat berbeda dari peradaban sekuler yang menanggalkan transendensi dalam pengelolaan urusan publik. Maka, jalan politik Nabi dapat menjadi titik tolak bagi rekonstruksi peradaban yang berakar pada welas asih, bukan sekadar efisiensi. Dalam menjawab tantangan global dibutuhkan model kepemimpinan yang bukan hanya unggul dalam kapasitas teknis, tetapi juga matang secara etis dan spiritual. Politik kenabian menghadirkan empat fondasi utama dalam struktur kepemimpinan: *qudwah* (keteladanan), *syura* (musyawarah), *'adl* (keadilan), dan *rahmah* (kasih sayang).

Dalam konteks kebangsaan Indonesia maupun dunia Islam secara umum, politik kenabian dapat dijadikan sebagai dasar etika publik yang menolak dominasi atas nama agama, melindungi hak-hak minoritas, dan memperkuat tali kemanusiaan universal. Sebagaimana peringatan Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), "Agama tanpa kemanusiaan adalah penindasan, dan politik tanpa moralitas adalah kehancuran".

E. Politik dan Akhlak: Menolak Kekerasan, Mengedepankan Dialog

²³ Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003), hlm. 144.

²⁴ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (New York: HarperOne, 2004), hlm. 176.

Salah satu ciri paling esensial dalam pendekatan politik Nabi Muhammad SAW ialah integrasi erat antara etika dan kekuasaan. Dalam visi kenabian, politik tidak dipandang sebagai arena kosong dari nilai atau sekadar panggung perebutan dominasi, melainkan sebagai sarana luhur untuk mewujudkan kemaslahatan kolektif melalui pendekatan yang sah, santun, dan bermartabat. Di tengah krisis etika politik dan maraknya eksploitasi agama pada masa kini, nilai-nilai tersebut perlu dikaji ulang dan dihidupkan kembali.

Selama menjalani perjuangannya, Nabi tidak menempatkan kekerasan sebagai strategi utama. Konfrontasi fisik hanya digunakan sebagai opsi terakhir, dan itu pun dalam rangka pembelaan diri, bukan ekspansi kekuasaan. Prioritas dakwah beliau senantiasa menitikberatkan pada dialog, musyawarah, serta proses edukatif yang persuasif. Salah satu contoh penting adalah Perjanjian Hudaibiyah, di mana Nabi memilih kesepakatan damai meskipun secara tekstual tampak merugikan umat Islam, demi membuka ruang komunikasi jangka panjang yang lebih kondusif bagi penyebaran pesan Islam.²⁵ Tariq Ramadan menyebut langkah Nabi sebagai bentuk kecerdasan politik yang lebih tinggi, yang berakar pada kesabaran moral dan etika strategis.²⁶ Sikap ini menjadi penegasan bahwa kekerasan bukanlah jalan kenabian. Dalam politik kenabian, kemenangan bukan semata soal dominasi fisik, tetapi perubahan hati dan kesadaran masyarakat.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan: “*dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*” (QS. Asy-Syūrā [42]: 38). Prinsip ini dihidupkan Nabi dalam seluruh aspek kepemimpinannya. Bahkan dalam medan perang, seperti Perang Uhud dan Khandaq, Nabi tetap membuka forum syura, menghargai pandangan sahabat, dan kadang menerima pendapat yang berbeda dari dirinya sendiri. Ini adalah manifestasi politik dialogis yang menolak absolutisme. Nabi Muhammad meletakkan dasar bahwa tidak ada manusia—bahkan seorang nabi—yang boleh memonopoli kebenaran sosial dan politik. Dalam hal ini, politik bukan ruang dogmatis, tetapi partisipatif, diskursif, dan terbuka.

Model dialog dan deliberasi dalam politik Islam merupakan refleksi dari *etik epistemologis Islam* yang menekankan keterbukaan terhadap argumen dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Ini seharusnya menjadi pedoman utama dalam praktik politik umat Islam dewasa ini. Sayangnya, politik agama dalam dunia kontemporer seringkali menyimpang jauh dari prinsip kenabian. Agama dijadikan alat justifikasi

²⁵ Muhammad Hamidullah, *The Muslim Conduct of State* (Lahore: Ashraf Press, 1977), hlm. 84.

²⁶ Tariq Ramadan, *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad* (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 113.

kekuasaan, pembenaran kekerasan, bahkan sumber konflik sektarian. Retorika keagamaan dimanfaatkan untuk mobilisasi politik identitas yang eksklusif dan penuh permusuhan. Hal ini bertentangan dengan semangat politik Nabi yang mengedepankan akhlak, toleransi, dan kemaslahatan publik.

Sayyid Hossein Nasr memperingatkan bahwa pengkhianatan terbesar terhadap politik kenabian adalah ketika agama digunakan untuk meraih kekuasaan tanpa menanamkan nilai-nilai etikanya.²⁷ Agama yang seharusnya menjadi cahaya justru dijadikan alat kegelapan. Ini menciptakan kekacauan moral dan mencemari makna dakwah yang sejati. Di Indonesia, gejala politik identitas yang mengeras cukup mengkhawatirkan. Alih-alih mendorong etika publik yang konstruktif, agama dipolitisasi untuk membangun blok kekuasaan eksklusif, bahkan dengan mengorbankan pluralitas dan kebinekaan. Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) pernah mengingatkan, “memperalat agama untuk meraih kekuasaan adalah bentuk kezaliman spiritual.”²⁸ Ucapan ini masih relevan sebagai kritik terhadap praktik politik agama yang menyimpang.

Jalan politik Nabi Muhammad mengajarkan bahwa akhlak adalah inti dari seluruh strategi sosial. Politik tanpa akhlak hanya akan melahirkan kekuasaan yang menindas. Oleh karena itu, umat Islam harus kembali meneguhkan misi kenabian: membangun masyarakat yang adil, damai, dan inklusif dengan cara-cara yang santun, etis, dan penuh kasih sayang. Jalan ini bukan jalan populis, tetapi jalan sunyi penuh tanggung jawab, sebagaimana yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ditegaskan Azyumardi Azra, kebangkitan politik Islam bukan terletak pada kekuasaan semata, tetapi pada keteladanan, kebajikan, dan kematangan moral dalam ruang publik.²⁹ Jalan politik Nabi adalah jalan peradaban, bukan dominasi. Jalan ini patut ditegakkan kembali sebagai alternatif atas kekacauan global hari ini, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi.

KESIMPULAN

Jalur politik yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW merupakan jejak historis yang penuh dengan nilai-nilai luhur dan pesan-pesan transformatif. Beliau bukan hanya

²⁷ Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: Allen & Unwin, 1966), hlm. 201.

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009), hlm. xv.

²⁹ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 172.

seorang pembawa risalah spiritual, tetapi juga sosok yang berhasil membentuk tatanan sosial-politik yang adil, inklusif, dan berperadaban. Sejak perjuangannya sebagai kelompok minoritas di Mekah hingga mengelola masyarakat pluralistik di Madinah, Nabi menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi fisik, melainkan pada otoritas moral yang dibangun melalui keteladanan, kasih sayang, dan kejujuran.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inti dari politik kenabian adalah keterhubungan erat antara prinsip tauhid dan keadilan sosial, antara nilai-nilai etika dan sistem kelembagaan, serta antara dakwah spiritual dan perubahan sosial yang menyeluruh. Nabi Muhammad tidak pernah memisahkan moralitas dari siasat politik. Beliau menolak penggunaan kekerasan sebagai sarana utama, dan lebih memilih pendekatan persuasif seperti musyawarah, pendidikan, dan diplomasi sebagai alat perubahan sosial. Bagi beliau, politik bukan untuk mengendalikan manusia, melainkan untuk membebaskan mereka dari bentuk-bentuk penindasan, baik lahir maupun batin.

Dalam lanskap global masa kini, di mana kepemimpinan tengah dilanda krisis legitimasi, serta meningkatnya ekstremisme identitas dan manipulasi agama dalam politik, model politik kenabian menghadirkan alternatif yang bernilai tinggi. Teladan Nabi menunjukkan bahwa peradaban hanya bisa tumbuh di atas fondasi moralitas yang kuat dan inklusif. Kepemimpinan beliau memiliki relevansi yang tinggi untuk menjawab tantangan zaman modern, bukan melalui ideologisasi agama, melainkan dengan menjadikan nilai-nilainya sebagai sumber etika publik yang membebaskan dan memmanusiakan.

Warisan politik Islam dari Nabi Muhammad adalah politik yang dilandasi oleh kasih sayang, bukan kebencian; berakar pada keadilan, bukan kekuasaan yang menindas; serta menjunjung tinggi dialog dan partisipasi, bukan otoritarianisme satu arah. Oleh sebab itu, jika umat Islam ingin membangun masyarakat politik yang bermartabat, maka mereka perlu merujuk kembali pada jalan kenabian—yakni membangun perubahan dari akar rumput, dengan bekal akhlak, ilmu, dan solidaritas insani. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]:21, bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik bagi umat, ayat ini bukan semata ajakan spiritual, melainkan juga undangan untuk menjadikan Nabi sebagai rujukan dalam membangun tatanan sosial yang etis, berkeadaban, dan penuh rahmat bagi seluruh makhluk.

Dengan demikian, politik kenabian yang diwariskan oleh Rasulullah bukanlah utopia belaka, tetapi realitas historis yang mengandung daya transformasi. Di tengah kehampaan moral dan krisis kepemimpinan yang melanda dunia saat ini, jejak kenabian merupakan pelita yang layak untuk diterangi kembali demi masa depan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Armstrong, Karen. *Muhammad: A Prophet for Our Time*. New York: HarperOne, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan, 2000.
- Bennis, Warren. *The Future of Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.
- Donner, Fred M. *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- Effendy, Bahtiar. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.
- Esposito, John L. *The Future of Islam*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Hamidullah, Muhammad. *The First Written Constitution in the World*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975.
- Hamidullah, Muhammad. *The Muslim Conduct of State*. Lahore: Ashraf Press, 1977.
- Ibn Hisham. *Al-Sīrah al-Nabawiyyah*, ed. Muḥammad al-Saqqār. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemandirian dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1990.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemandirian*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Ideals and Realities of Islam*. London: Allen & Unwin, 1966.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. New York: HarperOne, 2004.
- Qutb, Sayyid. *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*. Beirut: Dar al-Shuruq, 1987.
- Quradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Dawlah fī al-Islam: Bayna Naẓariyyah wa al-Taṭbīq*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Ramadan, Tariq. *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Raziq, Ali Abd al-. *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Kairo: Maktabat Misr, 1925.
- Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute, 2006.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad: Prophet and Statesman*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Zakaria, Rafiq. *Muhammad and the Quran: The Messenger and the Message*. New Delhi: Penguin Books, 1993.